



Community Empowerment Through the PKK Program in Ilangata Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency

Irma Dumbela^{1*}, Lisda Van Gobel², Tety Thalib³
Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Lisda Van Gobel lisdavangobel69@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Community Empowerment, PKK Group

Received : 20 November

Revised : 20 December

Accepted: 20 January

©2023 Dumbela, Gobel, Thalib: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine Community Empowerment Through the PKK Program in Ilangata Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency. This research consists of three focuses, namely the budget, socialization, and participation. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study concluded that the budget funds owned by the PKK group were not optimal. This can be seen from the minimum budget for the PKK Program which does not reach 10 percent. Socialization of community empowerment by the PKK group has not been optimal. This can be seen from the lack of socialization activities carried out by the PKK in order to invite the community to participate in empowerment activities. The participation of the ilangata community in the community empowerment program implemented by the PKK is still very low. This can be seen from the minimal number of people, especially women who participate in community empowerment activities or programs. It is suggested that more active efforts are needed to succeed in community empowerment through the PKK program in Ilangata Village, Anggrek District, Gorontalo Regency by optimizing budget management, increasing socialization activities and fostering a caring attitude for the community to actively participate in community empowerment programs.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Irma Dumbela^{1*}, Lisda Van Gobel², Tety Thalib³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Lisda Van Gobel lisdavangobel69@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok PKK

Received : 20 November

Revised : 20 Desember

Accepted: 20 Januari

©2023 Dumbela, Gobel, Thalib: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini terdiri dari tiga fokus yakni Anggaran dana, sosialisasi, dan partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Anggaran dana yang dimiliki oleh kelompok PKK belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya anggaran untuk Program PKK yang tidak mencapai 10 persen. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat oleh kelompok PKK belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PKK dalam rangka mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan. Partisipasi masyarakat ilangata dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PKK masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah masyarakat khususnya kaum perempuan yang ikut dalam kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat. Disarankan perlunya upaya yang lebih giat lagi dalam mensukseskan pemberdayaan masyarakat melalui program PKK Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo dengan cara mengoptimalkan pengelolaan anggaran, meningkatkan kegiatan sosialisasi serta menumbuhkan sikap peduli masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mampu mengerakan partisipasi masyarakat setempat dalam hal keterampilan, dan serta juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan masyarakat tersebut. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Organisasi PKK sudah melembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa

Dalam Pemberdayaan masyarakat ini diperlukan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang dapat menumbuh kembangkan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat agar tidak salah dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Maka dari itu ada beberapa alasan mengapa penting untuk mengkaji lebih dalam tentang program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Desa Ilangata adalah salah satu desa yang memiliki organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan mempunyai 10 program yaitu: (a) Penghayatan dan pengamalan pancasila, (b) Gotong royong, (c) Pangan, (d) Sandang, (e) Perumahan dan tatalaksana rumah tangga, (f) Pendidikan dan keterampilan, (g) Kesehatan, (h) Pengembangan kehidupan berkoperasi, (i) Kelestarian lingkungan hidup, serta (j) Perencanaan sehat.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada program pendidikan dan keterampilan. Di Desa Ilangata Diklat dibuat kepada Ibu-ibu guna meningkatkan keterampilan dan kerja sama yang baik antara anggota PKK, diklat hanya dibuat 2 kali dalam setahun yakni pada tahun 2019 mengingat masih kurangnya anggaran dana. Anggran dana yang digunakan yaitu dari dana Desa sebesar Rp 1.000,000, pertahunnya dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 11.000,000,- yang mencakup keseluruhan pelaksanaan program PKK termasuk didalamnya kegiatan sosialisasi, perjalanan dinas dll.

Program-program yang dilaksanakan oleh PKK di Desa Ilangata yaitu membuat kue dan kerajinan tangan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan masyarakat perlu melakukan koordinasi berupa komunikasi aktif baik dengan masyarakat terutama kaum perempuan . sehingga dalam menjalankan program PKK tersebut akan tercipta hubungan yang baik antara sesama penyelenggara guna kesuksesan dan keberhasilan programnya.

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karna itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang "statis", karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat "Dinamis". Pengertian ini organisasi dilihat dari pada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Kaswan (2012: 6) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia dengan pengertian, sebagai berikut: MSDM merupakan bagian dari manajemen yang meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. MSDM menangani SDM, yaitu orang yang siap, bersedia dan mampu memberi kontribusi terhadap tujuan stakeholders. MSDM memperhatikan kesejahteraan manusia dalam organisasi agar dapat bekerja sama secara efektif dan berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. MSDM merupakan sistem yang mempunyai beberapa fungsi, kebijakan, aktivitas, atau praktik diantaranya recruitment, selection, development, compensation, retention, evaluation, promotion, dan lain-lain.

Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain (meminjam parafrase Clausewitz tentang perang) (dalam parsons, 2014:464) Menurut Jenkis (dalam parsons, 2014:463) Studi implementasi adalah studi perubahan, yang memuat: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin tindakannya berbeda.

Pada hakikatnya implementasi merupakan sebuah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah diputuskannya sebuah kebijakan. Pada dasarnya ada dua pendekatan dalam melakukan analisis implementasi. Pertama, pendekatan kepatuhan. Pendekatan ini beranggapan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas yang menetapkan kebijakan tersebut. Kedua, perspektif "What's happening". Pendekatan ini memotret pelaksanaan suatu kebijakan dari segala hal, dengan asumsi bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dihubungkan oleh segala ragam variabel dan faktor. Dengan demikian, apa yang terlibat dan berlangsung didalam implementasi jauh lebih penting untuk ditangkap dan dikaji daripada mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang semestinya dilakukan.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya

Kata "pemberdayaan " adalah terjemahan dari bahasa Inggris "Empowerment", pemberdayaan berasal dari kata dasar "power" yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan "em" pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas

Kelembagaan dan pengelolaan gerakan PKK disebut Tim Penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan

penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksanya Program PKK. TP PKK ini meliputi pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa/kelurahan. Hubungan kerja antar TP PKK pusat dengan TP PKK provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan adalah bersifat konsultif, koordinatif, dan hirarkis serta mendekatkan jangkauan pembinaan keluarga-keluarga dibentuk kelompok PKK lingkungan, RW, RT dan kelompok Desawisma.

Dalam literatur pembangunan, konsep pemberdayaan bahkan memiliki perspektif yang lebih luas. Pearse dan Stiefel dalam buku *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik* mengatakan bahwa menghormati kebhinnekaan, keikhlasan lokal, dekonsentrasi kekuasaan, peningkatan kemandirian masyarakat merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Menurut Paul dalam buku yang sama, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan secara adil (*Equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan ini muncul sebagai sebuah formula atau tawaran untuk memecahkan problema kemiskinan dalam kehidupan sosial akibat efektifnya program pembangunan. Aprillia Tharesia dkk (2014:93) Secara Konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat. pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain menjadi perhatiannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kaswan (2012: 6) manajemen sumber daya manusia dengan pengertian, sebagai berikut: MSDM merupakan bagian dari manajemen yang meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. MSDM menangani SDM, yaitu orang yang siap, bersedia dan mampu memberi kontribusi terhadap tujuan stakeholders. MSDM memperhatikan kesejahteraan manusia dalam organisasi agar dapat bekerja sama secara efektif dan berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. MSDM merupakan sistem yang mempunyai beberapa fungsi, kebijakan, aktivitas, atau praktik diantaranya recruitment, selection, development, compensation, retention, evaluation, promotion, dan lain-lain.

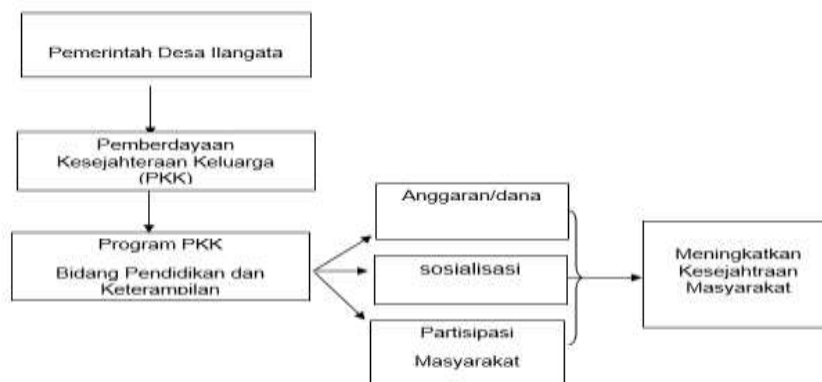
Aprillia Tharesia dkk (2014:93), Secara Konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat. pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Jenkis (dalam parsons, 2014:463) Studi implementasi adalah studi perubahan, yang memuat: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin tindakannya berbeda. Pada hakikatnya implementasi merupakan sebuah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah diputuskannya sebuah kebijakan. Pada dasarnya ada dua pendekatan dalam melakukan analisis implementasi. Pertama, pendekatan kepatuhan. Pendekatan ini beranggapan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas yang menetapkan kebijakan tersebut. Kedua, perspektif "What's happening". Pendekatan ini memotret pelaksanaan suatu kebijakan dari segala hal, dengan asumsi bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dihubungkan oleh segala ragam variabel dan faktor. Dengan demikian, apa yang terlibat dan berlangsung didalam implementasi jauh lebih penting untuk ditangkap dan dikaji daripada mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang semestinya dilakukan.

Nurazmi Izmi Rusdi (2019) bahwa dengan dilakukannya "Implementasi Program PKK Di Nagori Siantar Estate yang berada di Kecamatan Siantar dan juga masih Kabupaten Simalungun". Adapun dengan hal yang berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa didalam implementasi kebijakan program

PKK di Nagori Siantar Estate yang berada di Kecamatan Siantar dan masih dalam Kabupaten Simalungun adanya proses komunikasi yang kurang berjalan dengan baik dan lancar diantara para kader dengan masyarakat yang disebabkan oleh sosialisasi yang pelaksanaannya masih kurang maksimal dan layak. Didalam organisasi PKK Nagori Siantar Estate yang berada di Kecamatan Siantar dan masih termasuk Kabupaten Simalungun, Sumber Daya Manusia nya masih kurang untuk dapat melakukan tugas yang ada di dalam 10 program PKK dengan maksimal. Di instruksikan lewat surat yang diagendakan bahwa di Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) Nagori Siantar Estate yang berada di Kecamatan Siantar dan masih dalam wilayah Kabupaten Simalungun belum dilakukan sesuai aturan seperti tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diketahui struktur terhadap Birokrasi di dalam Organisasi PKK Siantar Estate di Kecamatan Siantar yang masih wilayah daerah Kabupaten Simalungun tidak dapat terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi bidangnya masing-masing para kader tersebut. Maka dari itu implementasi kebijakan suatu Program terhadap PKK di Nagori Siantar Estate yang berada di Kecamatan Siantar dan masih Kabupaten Simalungun kurang berjalan dengan sukses.

Jamah Harahap (2018) bahwa "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Simatahari yang terletak di Kecamatan Kota pinang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini adalah termasuk salah satu jenis penelitian lapangan seperti penelitian untuk mendapatkan semua data di lapangan atau data primer secara deskriptif serta kualitatif. Cara inilah yang digunakan seperti wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Adapun terlaksananya Penelitian ini diambil saat di Desa Simatahari yang terletak di Kecamatan Kotapinang dan masih wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam hal yang menyangkut dengan pemberdayaan Life Skill yang terjadi di Desa Simatahari yang berada di Kecamatan Kotapinang dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu, (1). memberikan bimbingan (2). memberikan peralatan (3). memberikan pelatihan dan yang ke (4). melakukan pemasaran.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sipatnya umum terhadap kenyataan social dan perspektif partisipan. Hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, analisisnya dan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi focus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Ruslan:2003:13).

HASIL PENELITIAN

Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesejahteraan dan berkeadilan gender serta beresadaran hukum dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2013 pasal 5 ayat 2, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK meliputi: 27 Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan keterampilan, Kesehatan, Pengembangan kehidupan berkoperasi, Kelestarian lingkungan hidup, dan Perencanaan sehat. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.



Gambar 2. Wawancara dengan Informan

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan data melalui proses observasi, wawancara dan analisa data sebagai berikut:

1. Anggaran Dana

Anggaran memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi publik tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakatnya, tetapi tidak jarang bahwa organisasi publik mendapatkan hambatan yang umumnya dikarenakan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki. Anggaran merupakan

sebuah proses dalam mengalokasikan sumber daya yang ada terhadap kebutuhan yang terbatas yang dilakukan oleh Organisasi Publik.

Adapun anggaran dana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketersediaan anggaran dana yang dimiliki oleh lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa Ilangata melalui program-programnya. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan data yang berkaitan dengan anggaran dana yakni sebagai berikut:

- a. Anggaran dana yang dimiliki oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata cukup terbatas. Pihak terkait mengatakan bahwa belum terlaksanakannya program-program unggulan pemberdayaan masyarakat seperti Pendidikan dan pelatihan dikarenakan terbatasnya anggaran sebagai biaya operasional kegiatan.
- b. Informan dengan secara jujur menuturkan bahwa meskipun Pendidikan dan pelatihan merupakan program prioritas kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata namun tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan dikarenakan membutuhkan biaya operasional yang cukup besar Informan menuturkan bahwa saat ini besaran anggaran dana yang dimiliki oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata tidak mencukupi untuk dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan. Lebih jauh informan menambahkan bahwa, saat ini anggaran dana desa di fokuskan pada pemulihan ekonomi pasca covid-19 melanda seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
- c. Informan selaku masyarakat, sangat awam tentang besaran anggaran dana yang dimiliki oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata. Informan menambahkan bahwa pihaknya tidak pernah diikutkan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya memberdayakan masyarakat
- d. Berdasarkan pengalaman informan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan. Sebelumnya, informan sudah mendapatkan informasi bahwa saat ini kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata belum memiliki dana operasional untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan.

2. Sosialisasi

Adapun sosialisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya memperkenalkan program-program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa Ilangata.

Berdasarkan hasil wawancara didapati data terkait sosialisasi yakni sebagai berikut:

- a. sosialisasi pemberdayaan masyarakat oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata sudah sering dilakukan. Informan mengatakan bahwa pihak selalu mengajak masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan dan hal tersebut dilakukan baik dalam suasana formal maupun non formal. wujud dari sosialisasi yang

efektif adalah dengan mengajak masyarakat secara langsung untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan

- b. Berbeda dengan beberapa informan sebelumnya bahwa pihaknya selaku masyarakat belum pernah mendapatkan ajakan atau tawaran untuk diikutkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. sosialisasi pemberdayaan masyarakat oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata belum optimal. Senada dengan informan sebelumnya masyarakat bahwa menurutnya selama ini dalam memperkenalkan program-programnya atau dalam rangka mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan pemberdayaan belum menggunakan pendekatan yang efektif yang mampu menarik simpati masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan.

3. Partisipasi

Berikut merupakan data hasil wawancara terkait partisipasi:

- a. partisipasi masyarakat ilangata dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata masih sangat rendah. Menurut informan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan dikarenakan kegiatan rutinitas masyarakat sehingga tidak terlalu memiliki banyak waktu untuk ikut dalam program pemberdayaan masyarakat.
- b. Menurut informan bahwa selama ini pihaknya sebagai masyarakat belum pernah terlibat dalam kegiatan yang diinisiasi oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata. Informan menyampaikan alasan yang cukup sederhana yakni belum memiliki ketertarikan dalam kegiatan di gagas oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Anggaran dana yang dimiliki oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata belum optimal. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara peraturan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, bahwa besaran anggaran untuk Program PKK bisa mencapai 10 persen dari jumlah dana desa dengan anggaran dana yang didapatkan.

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan sosialisasi yang diadakan atau dilaksanakan oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata dalam rangka mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan

Partisipasi masyarakat ilangata masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah masyarakat khususnya kaum perempuan yang ikut dalam kegiatan masih sangat rendah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya anggaran dana yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata, minimnya kegiatan sosialisasi dan tidak dilakukan secara menyeluruh, serta rendahnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam

kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata.

Penulis memiliki rekomendasi agar Perlunya mengoptimalkan jumlah anggaran dana yang harus dikelola oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangataberdasarkan peraturan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, bahwa besaran anggaran untuk Program PKK bisa mencapai 10 persen dari jumlah dana desa. Perlunya melakukan sosialisasi secara langsung dan menyeluruh dilapisan masyarakat terkait manfaat program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata. Perlunya menumbuhkan kepedulian masyarakat akan pentingnya program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mau secara aktif terlibat dalam setiap program-program yang digagas oleh kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata. Diperlukan upaya yang lebih giat lagi dalam mensukseskan pemberdayaan masyarakat melalui program PKK Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo dengan cara mengoptimalkan pengelolaan anggaran, meningkatkan kegiatan sosialisasi serta menumbuhkan sikap peduli masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk peneliti selanjutnya sangat diharapkan agar dapat membuat penelitian lanjutan terkait indikator Pemberdayaan program tambahan selain masalah anggaran dana, sosialisasi dan partisipasi. Penelitian lanjutan diharpkan dapat berfokus pada keterampilan yang dimiliki aparat desa yang dapat mempengaruhi kinerja dan kompetensi dalam hal pelayanan masyarakat.Selain itu untuk para peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan metode baru dalam upaya memberdayakan PKK lebih optimal di desa ilangata

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti penulis ingin menyampaikan rasa Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada .1) Tim pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyusun penelitian ini. 2) kepada seluruh aparatur desa selaku informan yang telah bersedia dalam memberikan data dan informasi terkait penelitian. 3) kepada desa ilangata yang telah memberikan izin serta akses untuk dapat melaksanakan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Gomes, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta.
<http://repository.uinsu.ac.id/3490/1/MANAJEMEN%20SUMBER%20DAYA%20MANUSIA.pdf>
- H. Hadari Nawawi, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1131871>

- Hasibuan, Melayu S.P.,2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2528
- Kaswan," manajemen sumber daya manusia" <http://library.binus.ac.id/eCollections/eThesiscoll/Bab2/2012-2-00773-HM%20Bab2001.pdf>
- Parsom,"implementasi kebijakan publik" http://repository.uin suska.ac.id/14810/7/7.%20BAB%20II_2018447ADN.pdf
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, Hlm. 12 http://repository.radenintan.ac.id/1169/3/BAB_II.pdf
- Tim Penggerak PKK Pusat, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan PKK*, (Jakarta : Tim Penggerak Pusat, (2015), hlm. 9b. <https://core.ac.uk/download/pdf/228851664.pdf>
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm. 252 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4430/>